

MITRA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Disesuaikan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya resmi mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

Hal ini menindaklanjuti Pasal 14 Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD). Salah satu ketentuan baru ialah penyesuaian kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

"Tindaklanjut dari pencabutan Perda 12/2002 ialah diterbitkan-nya Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Aturan itu sedang kami sosialisasikan hingga pertengahan bulan ini di tiap kelurahan," urai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Yogya Subarjilan, Rabu (11/9). Dalam Perwal 52/2024, disebutkan lembaga kemasyarakatan kelurahan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pengurus Kampung, RW, RT, Forum Bank Sampah Kelurahan, Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Karang Taruna. Seluruhnya menjadi mitra strategis bagi Pemkot Yogya dalam menjalankan fungsi pembangunan kewilayahan.

Subarjilan menjelaskan salah satu ketentuan baru ialah masa bakti kepengurusan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Jika dalam aturan sebelumnya masa jabatan tiga tahun, kini disesuaikan menjadi lima tahun. Selain itu juga masih bisa dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

"Lembaga kemasyarakatan kelurahan ini menjadi sarana partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan wilayahnya. Harapan kami partisipasinya bisa terus meningkat sehingga ketentuan baru ini masih terus kami sosialisasikan," imbuhnya.

Selain itu, masa bakti pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan paling banyak hanya dapat sela-

ma dua periode dengan masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kemudian apabila terdapat pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu satu bulan, maka harus diisi pengurus antar waktu.

"Ada beberapa jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sedikit berbeda tugasnya, yakni pada Pengurus Kampung, lembaga kemasyarakatan dibentuk warga kelurahan dalam satu wilayah kampung untuk membantu kelurahan dalam penguatan hubungan sosial kemasyarakatan," ujarnya.

Pihaknya menambahkan, selain tingkat tugas yang dilakukan berbeda, penambahan jenis lembaga kemasyarakatan kelurahan yang menjadi perhatian yakni Forum Bank Sampah Kelurahan. Lembaga itu yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dari sumbernya melalui Bank Sampah. "Hubungan kerja lembaga ke-

masyarakatan kelurahan dengan pemerintah kelurahan adalah bersifat kemitraan. Sehingga harapannya, melalui pembangunan berbasis kewilayahan, proses pembangunan diharapkan akan merata di seluruh wilayah, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat secara inklusi. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga akan lebih maksimal," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogya Yudianto Dwi Sutono mengajak masyarakat berperan serta dalam mendukung optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan kelurahan. Apalagi pendanaan kegiatan lembaga tersebut dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

"Kami berharap, sinergi kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat dapat menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Yogya. Sehingga, keberadaan lembaga-lembaga yang ada di wilayah diharapkan dapat menjadi wadah untuk menumbuhkembangkan sinergitas," tandasnya.

(Dhi)-f

Afnan-Singgih Silaturahmi dengan Haedar Nashir



KR-Devid Permama

Afnan-Singgih bersama pimpinan parpol pengusung usai silaturahmi dengan Ketum PP Muhammadiyah.

YOGYA (KR) - Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo bersama pimpinan delapan partai politik pengusung bersilaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Selasa (10/9).

Afnan Hadikusumo mengatakan, dari diskusi, diketahui banyak visi dan misi Afnan-Singgih yang sama dengan PP Muhammadiyah, yakni mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PP Muhammadiyah meminta Afnan-Singgih jika terpilih sebagai Walikota-Wakil Walikota Yogya, agar menjalankan program-program yang inovatif dan kreatif. "Agar program-program tidak monoton," katanya.

Menurut Afnan, Ketum PP Muhammadiyah berpesan agar Bapaslon Afnan-Singgih terus menjaga Kota Yogyakarta sebagai kota yang toleran, menjaga agar tetap berkarakter yang baik, menjaga kerukunan antarumat beragama dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Singgih Raharjo menambahkan, banyak hal yang disampaikan oleh Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Antara lain permasalahan-permasalahan yang ada harus ditangani secara baik, karena masyarakat menunggu pemimpin daerah yang akan memimpin Kota Yogyakarta. "Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus penjaga pendidikan, pariwisata dan budaya," ujarnya.

Selain itu, Ketum PP Muhammadiyah juga berpesan agar dilakukan lompatan-lompatan dan aktivasi untuk memajukan Kota Yogya. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah tinggi di Kota Yogyakarta harus diwujudkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Sehingga masyarakat Yogya betul-betul dalam menjalani kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari sisi kerukunan dan partisipasi dalam pembangunan," katanya.

Sementara itu, Herry Zudianto selaku penasihat Bapaslon Afnan-Singgih mengatakan, Kota Yogyakarta dengan sumber daya alam terbatas dan penduduknya yang padat, membutuhkan pemimpin yang punya pemikiran Out of The Box. "Maka Afnan-Singgih harus punya pemikiran yang out of the box, jangan mengejar kursi kekuasaan untuk dinikmati, tapi jadilah pelayan masyarakat," katanya.

(Dev)-f

'DAKON PERAK' PERKUAT PROGRAM KRPPA

Pemberdayaan Perempuan Dongkrak Ekonomi Keluarga

YOGYA (KR) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) Kota Yogya berupaya memperkuat program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Pemberdayaan perempuan terbukti mampu mendorong ekonomi keluarga.

Kepala DP3AP2KB Kota Yogya Retnaningtyas, menjelaskan sejak tahun 2023 lalu pihaknya menginisiasi pembentukan KRPPA sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Di dalamnya kemudian muncul program Dolan Ngaruhke Ekonomi Perempuan, Kampung KB dan Kampung Ranah Anak (Dakon Perak).

"Dengan adanya KRPPA, maka program Dakon Perak menjadi sistem pendukung yang mampu memperkuat KRPPA terutama dari segi pemetaan potensi serta permasalahan yang ada di wilayah," tandasnya, Rabu (11/9).

Pekan lalu, Dakon Perak

menyasar Kelurahan Kricak Tegalrejo. Kelurahan tersebut sebelumnya banyak terdapat keluarga dari kalangan pra sejahtera yang masuk dalam jaminan